

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
PSAK 50 (REVISI 2010) DAN PSAK 55 (REVISI 2011)
TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI SELURUH INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

INDRA MERVIANA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION INFLUENCE PSAK 50 (REVISED 2010) AND PSAK 55 (REVISED 2011) ON EARNINGS MANAGEMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT BANKS AROUND INDONESIA

BY

INDRA MERVIANA

The purpose of this study was to test empirically whether there were Analysis of implementation influence PSAK 50 (Revised 2010) and PSAK 55 (Revised 2011) on Earning Management in the Regional Development Banks in Indonesia 2009-2015. PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) is a financial accounting standard used in Indonesia to compile a company's financial statements. PSAK is a convergence with International Financial Reporting Standard or IFRS, which is effective as of January 1, 2012. PSAK 55 basically changes the measurement and recognition method, one of the changes is the recognition of financial assets, PSAK 55 divides financial assets into four classifications namely; Financial assets that are set to be measured at fair value through profit and loss, investments held to maturity, loans provided or receivables, and assets available for sale, one of the classifications of financial assets is loans provided or receivables.

BPD or Regional Development Bank is a Commercial Bank that is also required to be guided by PSAK 50 (revised 2010) and 55 (revised 2011), whose provisions are detailed in PAPI (Indonesian Banking Accounting Guidelines) published in 2008, where there are several changes Significant with the application of the intended PSAK, which includes: Enforcement of interest rates with effective interest system, accrual basis recognition of interest income and application of allowance for impairment losses (CKPN).

This study consisted of earnings management variables as dependent variables, IFRS as independent variables and control variables consisting of firm size and leverage. Earnings management is calculated using the Fixed Effect estimation model that has been tested using the Chow test and Hausman test.

The results showed that, first, the application of PSAK 50 and 55 did not have a significant effect on earnings management, and second, the leverage of the company had a significant positive effect on earnings management while the size of the company did not have a significant influence on earnings management.

Keywords: PSAK 50 (revised 2010), PSAK 55 (revised 2011), earnings management, CKPN, Accrual, BPD

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PSAK 50 (REVISI 2010) DAN PSAK 55 (REVISI 2011) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI SELURUH INDONESIA

OLEH

INDRA MERVIANA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, apakah terdapat pengaruh penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) terhadap manajemen laba pada Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia 2009-2015. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. PSAK merupakan konvergensi dengan *International Financial Reporting Standard* atau IFRS, yang berlaku efektif per 1 Januari 2012. PSAK 55 secara mendasar mengubah metode pengukuran dan pengakuan, salah satu perubahan adalah pengakuan aset keuangan, PSAK 55 membagi aset keuangan menjadi empat klasifikasi yaitu; aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang di berikan atau piutang, serta aset tersedia untuk di jual, salah satu klasifikasi aset keuangan adalah pinjaman yang di berikan atau piutang.

BPD atau Bank Pembangunan Daerah merupakan Bank Umum yang juga diwajibkan berpedoman pada PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011), yang ketentuannya secara terperinci diatur pada PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) yang terbit pada tahun 2008, dimana terdapat beberapa perubahan yang signifikan dengan pemberlakuan PSAK dimaksud, yang meliputi : Pemberlakuan bunga pinjaman dengan sistem bunga efektif, pengakuan pendapatan bunga secara akrual basic dan penerapan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Penelitian ini terdiri dari variabel manajemen laba sebagai variabel dependent, IFRS sebagai variabel independent dan variabel control yang terdiri dari ukuran perusahaan dan *leverage*. Manajemen laba dihitung menggunakan model estimasi *Fixed Effect* yang telah diuji menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penerapan PSAK 50 dan 55 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, dan kedua, *leverage* perusahaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen laba sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Kata Kunci : PSAK 50 (revisi 2010), PSAK 55 (revisi 2011), Manajemen Laba, CKPN, Akrual, BPD

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
PSAK 50 (REVISI 2010) DAN PSAK 55 (REVISI 2011)
TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI SELURUH INDONESIA**

Oleh

INDRA MERVIANA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Sains Akuntansi**

pada

**Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PSAK 50 (REVISI 2010) DAN PSAK 55 (REVISI 2011) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI SELURUH INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Indra Merviana**

No. Pokok Mahasiswa : 1521031020

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

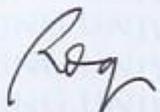
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.
NIP 19560620 198603 1 003

Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., C.A.
NIP 19691008 199501 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Einda Evana, S.E., M.Si, Akt., CA., CPA.

Sekretaris : Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., CA.

Penguji Utama : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 020

4. Tanggal Lulus Ujian : 15 Agustus 2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Merviana

NPM : 1521031020

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PSAK 50 (REVISI 2010) DAN PSAK 55 (REVISI 2011) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI SELURUH INDONESIA ”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 15 Agustus 2018



Indra Merviana

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 Maret 1973, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Mirhansyah, SH. dan Ibu Asliana Asyik, Amd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1985 di SDN 1 Jagabaya, Bandar Lampung. Selanjutnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diselesaikan oleh penulis di SMPN 2 Bandar Lampung pada tahun 1988 dan kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 1991. Pada tahun 1995, penulis mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung.

Pada tahun 2015, penulis melalui jalur reguler terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, penulis dinyatakan lulus dalam ujian tesis, dengan bergelar Magister Sains Akuntansi.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur hamba ucapkan kehadiran

ALLAH SWT

atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya,

shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi panutan hamba

NABI BESAR MUHAMMAD SAW.

Karya sederhana ini kupersembahkan bagi

KEDUA ORANG TUAku tersayang

dan bagi

KELUARGAku tercinta.

MOTTO

*“WATTAQULLAAH WA YU’ALLIMUKUMULLAAH,
WALLAAHU BIKULLI SYAI-IN ‘ALIIM.”*

**“BERTAKWALAH PADA ALLAH MAKA ALLAH AKAN MENGAJARIMU.
SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA MENGETAHUI SEGALA SESUATU.”**

SURAT AL-BAQARAH AYAT 282

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tesis dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Pembangunan Daerah Diseluruh Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah diperoleh penulis selama ini telah membantu mempermudah proses penyusunannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku Pembimbing I dan Ketua Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan

dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada penulis.

5. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., CA. selaku Pembimbing II dan Sekretaris Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini.
7. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku Anggota Penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini.
8. Bapak Eria Desomsoni, S.E., M.B.A., Direktur Utama PT. Bank Lampung, terima kasih atas dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengalamannya, selama penulis menimba ilmu sebagai mahasiswa pada program study Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Mas Andri Kasrani, S.Pd., Mbak Leni, Mas Nicho Kusuma, S.E., M.S.Ak dan seluruh staff karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih telah memberikan bantuan dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
11. Papah dan mamah tercinta Hi. Mirhansyah dan Hj. Asliana Asyik serta adik – adikku, Heni, Tri, Lily, Empit, Elva dan Jaka, terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang, kesabaran, serta doa-doa di setiap saat kepada penulis.

12. Suamiku Hestu Priyohutomo dan anak – anakku Gilang Nata Hafara, Bintang Nata Hafara dan Cahya Nata Hafara, terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang, kesabaran, serta doa-doa di setiap saat kepada penulis.
13. Rekan rekan MIA reguler angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan selama ini dan semoga tali silaturahmi kita tidak terputus.
14. Rekan rekan dan sahabat pada PT. Bank Lampung, khususnya Tim pada Divisi Kredit dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan, terima kasih atas dukungannya untuk penyelesaian tesis ini.
15. Seluruh kerabat dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Bandar Lampung, 15 Agustus 2018
Penulis,

Indra Merviana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Agensi	13
2.1.2 Adopsi IFRS di Indonesia	14
2.1.2.1 Perbedaan antara IFRS dengan US GAAP	17
2.1.2.2 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Instrumen Keuangan di Indonesia	18
2.1.3 Manajemen Laba	20
2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba	21
2.1.3.2 Teknik Manajemen Laba AkruaI	22
2.2 Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Implikasi Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 Pada Bank Pembangunan Daerah	26
2.3 Faktor lain yang dapat mempengaruhi Manajemen Laba	31
2.4 Penelitian Terdahulu	32
2.5 Model Penelitian	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.4 Variabel Penelitian	37
3.4.1 Variabel Indipenden	37
3.4.2 Variabel Dependen	37
3.5 Pengujian Hipotesis	40
3.5.1 Uji Regresi Linier Berganda	40
3.6 Metode Analisis	41
3.6.1 Model Estimasi	41
3.6.2 Pemilihan Metode Estimasi dan Pengujian Hipotesis	42

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	47
4.2 Hasil Pengujian Hipotesis	48
4.2.1 Pengaruh Penerapan PSAK 50 dan 55 Terhadap manajemen Laba	48
4.2.2 Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 50 dan 55	51
4.3 Pembahasan	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	58
5.2 Keterbatasan Penelitian	58
5.3 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik	47
Tabel 4.2 Metode Estimasi.....	48
Tabel 4.3 Fixed Effect.....	49
Tabel 4.4 Uji Normalitas Data	51
Tabel 4.5 Uji Beda Rata-Rata Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 50 dan 55	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Pengaruh Penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) Terhadap Manajemen Laba	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data
- Lampiran 2 Hasil Olah Data
- Lampiran 3 Uji Normalitas Data
- Lampiran 4 Hasil Uji *Wilcoxon signed rank test*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar akuntansi keuangan mutlak diperlukan bagi perusahaan-perusahaan termasuk bank, untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan yang relevan, handal dan dapat dipertanggung jawabkan, Laporan Keuangan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi antara lain berisikan aturan-aturan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian Laporan Keuangan. Standar akuntansi juga digunakan agar Laporan Keuangan antar perusahaan memiliki keseragaman dalam penyajiannya, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan tersebut.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan Standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia untuk menyusun Laporan Keuangan perusahaan. Praktik akuntansi di setiap negara berbeda-beda, ini dikarenakan adanya pengaruh lingkungan, ekonomi, social, budaya dan politik di masing-masing Negara. Sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kredibilitas serta komparabilitas pelaporan keuangan, pada tahun 1994 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi internasional dalam rangka pengembangan

standar akuntansinya. Pada tahun 2008 IAI telah melakukan pengumuman rencana konvergensi standar akuntansi lokal yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dengan *International Financial Reporting Standard* atau IFRS.

Dalam hal konvergensi IFRS ini, Indonesia melakukannya dengan tiga tahapan.

Dimulai dengan tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, kemudian tahap persiapan akhir pada tahun 2011, dan yang terakhir adalah tahap implementasi pada tahun 2012. Salah satunya yaitu PSAK terkait instrumen keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, PSAK 50 (revisi 2010) mengatur tentang instrumen keuangan berupa penyajian dan pengungkapan sementara itu dan PSAK 55 (revisi 2011) mengatur tentang Instrumen keuangan : berupa pengakuan dan pengukuran.

PSAK 55 secara mendasar mengubah metode pengukuran dan pengakuan, salah satu perubahan adalah pengakuan aset keuangan. PSAK 55 membagi aset keuangan menjadi empat klasifikasi yaitu ; aset keuangan yang ditetapkan untuk di ukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang di berikan atau piutang, serta aset untuk di jual.

Salah satu klasifikasi aset keuangan adalah pinjaman yang di berikan atau piutang.

Menurut Agrarita (2012), dampak utama dari PSAK 50 dan PSAK 55 adalah dalam valuasi pencadangan kredit bermasalah dimana penekanannya adalah pada objektivitas dalam menentukan Cadangan Kerugian penurunan Nilai (CKPN) dari kredit yang

diberikan yang harus berdasarkan data historis 3 tahun kebelakang, dan juga adanya keharusan valuasi debitur secara individual. Sebelumnya perhitungan CKPN berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dimana terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria penentuan kualitas kredit beserta persentase pencadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing klasifikasi kualitas kredit. Apabila diterapkan dengan benar maka penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 akan meningkatkan akurasi dan keinformatipan CKPN. Namun demikian karena sifat PSAK 50 dan 55 yang *principle based* dan menekankan pada konsep maka pada penerapannya dapat memberikan ruang yang lebih bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Ditambah lagi karena tingkat kompleksitas yang tinggi dari PSAK 50 dan 55 maka apabila sumber daya manusia baik dari akuntan internal perusahaan maupun auditor eksternal serta teknologi informasi belum siap/tersedia hal ini dapat menyebabkan tingkat akurasinya diragukan.

Sulistyanto (2008) mengemukakan bahwa keberadaan aturan dalam standar akuntansi merupakan salah satu alat yang mengakomodasi dan memfasilitasi perusahaan melakukan kecurangan. Perusahaan dapat menyembunyikan kecurangan dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang terdapat dalam standar akuntansi, sehingga standar akuntansi seolah-olah mengakomodasi dan memberi kesempatan perusahaan untuk mengatur dan mengelola laba perusahaan.

PSAK 50 dan PSAK 55 memperkenalkan "*impairment*" atau penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan, penurunan nilai pinjaman diberikan dapat dihitung dengan dua

cara, yaitu secara individu dan dihitung secara kolektif. Perhitungan penurunan nilai secara individu sifatnya memperhitungkan kasus per kasus berdasarkan probabilitas suatu pinjaman diberikan menjadi default. Sedangkan perhitungan secara kolektif adalah perhitungan penurunan nilai aset keuangan yang signifikan tetapi secara individual tidak mengalami penurunan nilai. Jadi, kredit yang kualitasnya baik yaitu yang kelancaran pembayaran dan prospek usaha dinilai baik akan memperkecil jumlah penurunan nilai, sementara disisi lain kredit yang kualitasnya kurang baik akan menjadi semakin besar penurunannya.

Melalui Laporan Keuangan yang memuat informasi mengenai prestasi perusahaan di masa yang lalu, para investor dapat meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang akan timbul dari keputusan investasi yang diambilnya. Investor pada umumnya hanya menaruh perhatian pada informasi laba, tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini telah menciptakan peluang bagi manajemen untuk melakukan praktek manajemen laba. Keadaan ini diperburuk dengan adanya kesenjangan informasi antara investor dengan manajemen, di mana manajemen mengetahui lebih banyak tentang keadaan perusahaan dan masalah-masalah di dalamnya dibandingkan dengan investor, kreditor atau pihak luar lainnya.

Menurut Scoot (2000), manajemen laba atau modifikasi laba adalah suatu tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pihak manajemen dan atau nilai pasar perusahaan.

Manajemen laba dilakukan untuk memenuhi kepentingan manajemen dengan cara memanfaatkan kelemahan internal dari kebijakan akuntansi namun tetap berada dalam koridor *General Accepted Accounting Principles*.

Menurut Simbolon dan Budiharta (2015) adopsi IAS 32 (2009) menjadi PSAK 50 (revisi 2010) merupakan penyempurnaan dari PSAK 50 (2006) dengan menambahkan satu ruang lingkup yaitu kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis, bertambahnya definisi *puttable instrumen* dan klasifikasi instrumen keuangan, reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas, serta adanya aturan mengenai kewajiban menyerahkan bagian aset neto secara pro rata saat likuidasi. Hal ini menyebabkan penyajian instrumen keuangan menjadi lebih rinci dan diharapkan mampu mengurangi “celah” manajer melakukan manajemen laba.

Selanjutnya, bertambahnya aturan reklasifikasi yang lebih ketat pada PSAK 55 (Revisi 2011) yang merupakan adopsi IAS 39 (2009) juga diharapkan dapat membatasi manajer melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba yang dihasilkan akan berbeda.

Setelah mengadopsi IAS 39 (2009), PSAK 55 (2011) memperkenalkan entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) dan laba (rugi) yang muncul diakui dalam laporan laba rugi, dan dari kelompok tersedia untuk dijual (AFS) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) dan laba (rugi) yang muncul diakui sebagai ekuitas.

Penelitian mengenai dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Nnadi (2016), mmeneliti mengenai dampak IFRS terhadap manajemen laba pada perbankan Nigeria. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan manajemen laba pada perbankan di Nigerian.

Kemudian Onelo *et al.*, (2014) yang meneliti mengenai dampak perubahan standar akuntansi, dengan dua puluh delapan perbankan, delapan Malaysia dan dua puluh bank Nigeria sebagai sampel yang mencakup periode 2008-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adopsi IFRS dapat menurunkan nilai manajemen laba dan penelitian ini merekomendasikan adopsi global IFRS sebagai kerangka pelaporan.

Untuk di Indonesia sendiri, dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan juga telah dilakukan. Simbolon dan Budiharta (2015) meneliti mengenai perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS dalam PSAK instrumen keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014. Berdasarkan kriteria purposive sampling diperoleh 27 sampel dengan tahun penelitian 2009-2014, hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kualitas laba sesudah adopsi IAS/IFRS lebih baik dibandingkan sebelum adopsi IAS/IFRS.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santy *et al.*, (2016) yang meneliti mengenai dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada penerapan adopsi IFRS terutama dalam PSAK 50 dan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan. Objek penelitian tersebut adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun (2008-2011), yaitu sebanyak 23 bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap penurunan manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Santi *et al.*, (2016), penelitian Pratama dan Ratnaningsih (2014) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laba yang diukur dengan manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

Berdasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten antara para peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan Nnadi (2016) dan Onelo *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa penerapan IFRS dapat menurunkan manajemen laba. Serta penelitian Simbolon dan Budiharta (2016) yang menyatakan adanya perbedaan manajemen laba sesudah dan sebelum penerapan IAS/IFRS.

Sedangkan Pratama dan Ratnaningsih (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan IAS/IFRS. Kemudian penelitian Santy *et al.*, (2016) juga menyatakan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adanya ketidak konsistenan penelitian sebelumnya mengenai dampak adopsi IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ulang, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang hanya di khususkan pada Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia atau BPD. Hal tersebut mengingat sangat sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai dampak penerapan IFRS khususnya penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) pada BPD di Indonesia, yang penerapannya di Indonesia dan diadopsi secara penuh terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012.

PSAK No, 50 (Revisi 2014), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan, persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas, pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan suatu entitas terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2014), menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset

keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item non keuangan, PSAK ini memberikan definisi dari karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masing-masing instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

BPD merupakan bagian dari perbankan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, swasta, asing dan campuran) yakni sebagian besar dana pihak ketiga merupakan dana milik pemerintah, khususnya Pemda. Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah (Sunarsip, 2009).

BPD atau Bank Pembangunan Daerah merupakan Bank Umum yang juga diwajibkan berpedoman pada PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011), yang ketentuannya secara terperinci diatur pada PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) yang terbit pada tahun 2009, dimana terdapat beberapa perubahan yang signifikan dengan pemberlakuan PSAK dimaksud, yang meliputi : Pemberlakuan bunga pinjaman dengan system bunga efektif, pengakuan pendapatan bunga secara akrual basic dan penerapan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni hanya mencapai 26 % sedangkan kredit konsumtif dalam hal ini penyaluran kredit kepada PNS mencapai 74 %, menyebabkan

penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) berpengaruh signifikan terhadap laba BPD, mengingat kredit kepada PNS memiliki jangka waktu yang relatif panjang menyebabkan pemberlakuan bunga pinjaman dengan system bunga efektif sangat berpengaruh pada metode pengakuan pendapatan, dikarenakan banyak BPD menerapkan pencatatan Bank dengan pemberlakuan bunga pinjaman berdasarkan system bunga efektif sedangkan kontraktual kepada debitur diberlakukan system bunga flat.

Sehingga berdasarkan data dan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penerapan standar akuntansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dengan meminimalisir tingkat manajemen laba melalui aturan-aturan yang ketat dalam penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Pembangunan Daerah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada Laporan Keuangan Bank Pembangunan Daerah sebelum dan setelah penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (Revisi 2011) dan penelitian yang dilakukan mencakup pembahasan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pinjaman yang diberikan serta pengaruhnya terhadap laba yang dihasilkan oleh bank.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, apakah penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia pada tahun 2009-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Pengujian kembali mengenai dampak penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) terhadap manajemen laba atas ketidak konsistenan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih menjelaskan mengenai dampak pengaruh penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) terhadap manajemen laba khususnya pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

Dengan adanya perpanjangan tahun dalam kriteria pemilihan sampel dalam

penelitian ini (3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah) diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) terhadap manajemen laba.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan untuk menganalisa dampak penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976). Permasalahan konflik kepentingan tidak hanya terdiantara prinsipal dan agentetapi juga permasalahan antara agen dengan *stakeholder* baik itu investor, regulator, kreditur, dan lain-lain. Hal tersebut didukung oleh tiga hipotesis pada teori akuntansi positif yang diajukan oleh Watts dan Zimmerman (1986). *Bonus plan hypothesis* merupakan bentuk keagenan antara principal (pemilik perusahaan) dan agen, *debt (equity) hypothesis* merupakan bentuk keagenan antara agen dan kreditur, serta *political cost hypothesis* merupakan bentuk keagenan antara agen dan regulator.

Menurut Scoot (2010), manajemen laba atau modifikasi laba adalah suatu tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan

memaksimalkan kesejahteraan pihak manajemen dan atau nilai pasar perusahaan. Manajemen laba dilakukan untuk memenuhi kepentingan manajemen dengan cara memanfaatkan kelemahan interen dari kebijakan akuntansi namun tetap berada dalam koridor *General Accepted Accounting Principles*. Chen (2009) menyatakan bahwa standar akuntansi IFRS dapat mengurangi pilihan kebijakan, membatasi kesempatan manajemen melakukan diskresi (*management's opportunistic discretion*), dan membutuhkan pengukuran akuntansi serta pengungkapan yang lebih. Sehingga melalui IFRS akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Adopsi IAS 32 (2009) menjadi PSAK 50 (2010), IAS 39 (2009) menjadi PSAK 55 (2011), dan IFRS 7 (2009) menjadi PSAK 60 (2010) memberikan perbedaan dalam hal penyajian, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan instrumen keuangan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS. Dampak adopsi IAS 32 (2009) menjadi PSAK 50 (2010) dengan menambah istilah *puttable instrument*, bertambahnya ruang lingkup kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis. Hal ini menyebabkan penyajian instrumen keuangan menjadi lebih rinci yang memungkinkan dapat mengurangi praktik manajemen laba Simbolon dan Budiharta (2015)

2.1.2 Adopsi IFRS di Indonesia

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat :

- 1) *Full Adoption*; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa negara tersebut.
- 2) *Adopted*; Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
- 3) *Piecemeal*; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
- 4) *Referenced (konvergence)*; Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
- 5) *Not adopted at all*; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Pada tahun 1994 Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) telah melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi internasional dalam rangka pengembangan standar akuntansinya. Diawali pada tahun 2008 IAI telah melakukan pengumuman rencana konvergensi standar akuntansi lokal yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dengan *International Financial Reporting Standart (IFRS)*. Dalam hal konvergensi IFRS ini, Indonesia melakukannya dengan tiga tahapan, diawali dengan tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, kemudian tahap persiapan akhir pada tahun 2011, dan yang terakhir adalah tahap implementasi pada tahun 2012.

Dukungan program konvergensi PSAK ke IFRS sangat didukung oleh pemerintah dalam hal ini, Bapepam-LK dan Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 yang salah satu tujuannya adalah menciptakan suatu standar akuntansi yang berkualitas yang dapat berlaku secara internasional. Selain itu, program konvergensi PSAK ke IFRS juga merupakan salah satu rekomendasi dalam *Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing* yang disusun oleh *assessor World Bank* yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* (BAPEPAM LK, 2010).

Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat antara lain :

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Untuk meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

2.1.2.1 Perbedaan antara IFRS dengan US GAAP

Perbedaan signifikan antara US GAAP dengan IFRS adalah bidang pendekatan umum. IFRS didasari prinsip dasar akuntansi dengan panduan pengaplikasian yang terbatas sedangkan US GAAP didasari aturan dengan panduan aplikasi yang spesifik (Bohusova dan Nerudova, 2009). Selanjutnya adapun perbedaan terhadap metode arus persediaan, IFRS mengizinkan untuk menggunakan metode *first in first out* (FIFO) dan metode rata-rata (*average*) akan tidak memperbolehkan penggunaan *last in first out* (LIFO) (Smith, 2012).

Pada laporan keuangan konsolidasi, apabila perusahaan induk dan anak memiliki periode keuangan yang berbeda maka terdapat perbedaan perlakuan terhadap transaksi yang terjadi pada *gap period*. Menurut GAAP, transaksi hanya membutuhkan pengungkapan tetapi menurut IFRS diperlukan adanya penyesuaian (Kaiser, 2012). Perbedaan lain terletak pada pengujian adanya potensi *impairment* pada aset jangka panjang. IFRS mengharuskan penggunaan *discounted cash flow* dari entitas atau *fair value based* untuk mengukur *recoverabilitas* suatu aset. Sebagai pembandingnya, GAAP menggunakan dua langkah pengujian yang diawali dengan penggunaan *discounted cash flow*. Suatu perbedaan yang mendasar pada model impairment dapat mengakibatkan perbedaan nilai apabila dilakukan impairment pada suatu aset.

2.1.2.2 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Instrumen Keuangan di Indonesia

Sebelum mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 32 dan 39 (2009), PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) mengacu pada SFAS 115 tentang *Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities* dan SFAS 133 tentang *Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities*. PSAK 50 (1998) tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu dan PSAK 55 (1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mulai berlaku efektif 1 Januari 1999. Hal ini berkaitan dengan peraturan tentang pengukuran dan sistematika penyajian instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB).

Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan selain berpedoman pada PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) juga berpedoman pada PSAK 10 (1995), PSAK 28 (1996), PSAK 31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 (1998), dan PSAK 43 (1997). Bulan September dan Desember tahun 2006, IAI menerbitkan PSAK 50 (revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran sehubungan dengan diterbitkannya IAS 32 (2005) : *Financial Instrument: Disclosure and Presentation* dan IAS 39 (2005) : *Financial Instrument: Recognition and Measurement*. Sebagai bentuk tanggapan atas perubahan peraturan tentang instrumen keuangan akibat konvergensi ke IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005) menjadi

PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006), Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang mewajibkan semua perusahaan perbankan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan (Boediono, 2008).

Pada awalnya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku per 1 Januari 2008, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang diterbitkan pada 27 Januari 2009, disebutkan bahwa penggunaan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Dalam PSAK 50 (revisi 2010) par. 07, instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Sebelum mengadopsi IAS 39, istilah instrumen keuangan dalam PSAK 50 (1998) par. 06 disebut sebagai „efek“ yang memiliki definisi surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1998) instrumen keuangan lebih mengacu pada jenisnya, seperti surat pengakuan hutang, saham, obligasi dan sebagainya, sedangkan instrumen keuangan dalam PSAK 50 (revisi 2010) menekankan pada „kontrak“ sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

Perihal instrumen keuangan yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, pada bulan Oktober 2011 IAI menerbitkan PSAK 55 (revisi 2011) untuk menggantikan PSAK 55 (revisi 2006) yang sudah ada, sebagai bagian dari tahap penyempurnaan adopsi IAS 39 (2009) dan berlaku efektif pelaksanaan pada 1 Januari 2012. Perbedaan antara PSAK 55 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2011) adalah peraturan mengenai reklasifikasi dari kelompok investasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke kelompok „pinjaman yang diberikan dan piutang“ dan reklasifikasi dari „tersedia untuk dijual“ ke kelompok „pinjaman yang diberikan dan piutang“. Dengan kata lain PSAK 55 (revisi 2011) hanya sebagai bentuk upaya penyempurnaan IAS 39 yang sebenarnya sudah ada pada PSAK 55 (revisi 2006).

2.1.3 Manajemen Laba

Scott (2012) mendefinisikan earning management sebagai tindakan manajemen dengan memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraannya dan atau nilai pasar perusahaan (taking a bath, income minimization, income maximization, income smoothing). Abdelghany (2005) menjelaskan bahwa earning management merupakan manipulasi pendapatan yang dilakukan untuk memenuhi target yang ditetapkan manajemen. Sementara Lo (2008) mengelompokkan earnings management dalam dua katagori yakni real earning management seperti tindakan untuk mempengaruhi arus kas, dan accrual management melalui perubahan dalam estimasi dan kebijakan akuntansi. Peneliti lain yaitu Jiraporn, et al. (2006)

mengelompokkan earnings management ke dalam dua kelompok yakni beneficial earning management dan opportunistic earning management.

2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Bentuk-Bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2012) Yaitu:

1. *Taking a bath*

Disebut juga big baths, dapat terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. *Income Minimization*

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian beroperasi politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang-barang

modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran ada iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. *Income Maximization*

Maksimalkan laba bertujuan untuk review memperoleh bonus yang lebih besar, Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun drastis.

5. *Timing Revenue and Expenses Recognition.*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

2.1.3.2 Teknik Manajemen Laba Akrua

Teknik manajemen laba biasanya dilakukan dengan menggunakan komponen akuntansi akrual. Akrua merupakan suatu transaksi yang dilaporkan tanpa perlu ada aliran kas

yang masuk atau keluar. Oleh karena itu, komponen ini mudah digunakan untuk mengintervensi laba. Lebih lanjut lagi, penelitian ini menguji manajemen laba untuk teknik akrual. Komponen akrual terdiri dari dua yaitu *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sedangkan *non discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.

Dibidang akademis, perkembangan setiap model manajemen laba dengan berbagai keunggulan dan kelemahan ini tentu sangat menggembirakan. Namun sejauh ini hanya model yang menggunakan basis akrual (*accruals basis*) yang diterima sebagai model yang memberikan hasil yang cukup kuat untuk mendeteksi keberadaan manajemen laba. Ada dua alasan yang mendasari mengapa model yang memproksikan manajemen laba dengan *discretionary accruals* ini lebih dapat diterima dan dipergunakan dalam berbagai penelitian manajemen laba.

1. Akuntansi berbasis akrual

Model manajemen laba berbasis aggregate accruals sejalan dengan basis akuntansi yang selama ini banyak dipergunakan di berbagai negara, yaitu akuntansi berbasis akrual (accruals accounting). Secara konseptual akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui dan mencatat semua transaksi (transaction) dan peristiwa (event) berdasarkan waktu terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Artinya suatu transaksi sudah dapat diakui dan dicatat sebagai hak walaupun kas baru akan diterima pada periode berikutnya atau mengakui hak pada periode berikutnya walaupun kas telah diterima.

Sebaliknya suatu transaksi sudah dapat diakui dan dicatat sebagai kewajiban walaupun kas baru akan dikeluarkan pada periode berikutnya atau mengakui kewajiban pada periode berikutnya walaupun kas telah dikeluarkan. Hingga dalam akuntansi berbasis akrual tidak semua transaksi dan peristiwa harus dilakukan secara tunai.

2. Menggunakan seluruh komponen laporan keuangan

Model manajemen laba berbasis aggregate accruals merupakan model yang menggunakan komponen-komponen laporan keuangan yang secara langsung dideteksi sebagai obyek rekayasa akuntansi. Secara teoritis, akuntansi berbasis akrual mengakibatkan munculnya beberapa komponen non kas dalam laporan

keuangan, misalkan hutang, piutang, biaya dibayar dimuka (deffered charge), pendapatan diterima dimuka, biaya cadangan kerugian dan penurunan nilai aktiva lancar, biaya penyusutan (amortisasi, depresiasi, dan deplesi) aktiva, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, komponen non kas merupakan penyebab munculnya komponen akrual dalam laporan keuangan. Komponen non kas ini tidak akan ada jika perusahaan menggunakan akuntansi berbasis kas.

Komponen non kas atau akrual inilah yang selama ini ditenggarai dipakai sebagai obyek “permainan” manajer ketika mengelola dan mengatur laba yang akan dilaporkannya. Hal ini bisa dilakukan karena manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan mengganti metode dan prinsip akuntansi untuk mencatat komponen-komponen itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya sehingga pengembangan model manajemen yang menggunakan komponen-komponen itu relatif dapat diterima karena sejalan dengan akuntansi berbasis akrual. Apalagi mengingat discretionary accruals (proksi manajemen laba) merupakan selisih antara total akrual dan nondiscretionary accruals, yang merupakan komponen utama laba dalam akuntansi berbasis akrual (Sulistyanto, 2008).

2.2 Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Implikasi Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 Pada Bank Pembangunan Daerah

Sulistiyanto (2008) mengemukakan bahwa keberadaan aturan dalam standar akuntansi merupakan salah satu alat yang mengakomodasi dan memfasilitasi perusahaan melakukan kecurangan. Perusahaan dapat menyembunyikan kecurangan dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang terdapat dalam standar akuntansi, sehingga standar akuntansi seolah-olah mengakomodasi dan memberi kesempatan perusahaan untuk mengatur dan mengelola laba perusahaan. IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh akan mengurangi tingkat asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) ketidakseimbangan informasi antara manajer dengan pihak pengguna laporan keuangan.

Menurut Simbolon dan Budiharta (2015) adopsi IAS 32 (2009) menjadi PSAK 50 (revisi 2010) merupakan penyempurnaan dari PSAK 50 (2006) dengan menambahkan satu ruang lingkup yaitu kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis, bertambahnya definisi *puttable instrumen* dan klasifikasi instrumen keuangan, reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas, serta adanya aturan mengenai kewajiban menyerahkan bagian aset neto secara pro rata saat likuidasi. Hal

ini menyebabkan penyajian instrumen keuangan menjadi lebih rinci dan diharapkan mampu mengurangi “celah” manajer melakukan manajemen laba. Selanjutnya, bertambahnya aturan reklasifikasi yang lebih ketat pada PSAK 55 (Revisi 2011) yang merupakan adopsi IAS 39 (2009) juga diharapkan dapat membatasi manajer melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba yang dihasilkan akan berbeda.

Setelah mengadopsi IAS 39 (2009), PSAK 55 (2011) memperkenankan entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) dan laba (rugi) yang muncul diakui diakui dalam laporan laba rugi, dan dari kelompok tersedia untuk dijual (AFS) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) dan laba (rugi) yang muncul diakui sebagai ekuitas.

Penelitian mengenai dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Nnadi (2016), meneliti mengenai dampak IFRS terhadap manajemen laba pada perbankan Nigeria. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan manajemen laba pada perbankan di Nigerian. Kemudian Onelo *et al.*, (2014) yang meneliti mengenai dampak perubahan standar akuntansi, dengan dua puluh delapan perbankan, delapan Malaysia dan dua puluh bank Nigeria sebagai sampel yang mencakup periode 2008-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adopsi IFRS dapat menurunkan

nilai manajemen laba dan penelitian ini merekomendasikan adopsi global IFRS sebagai kerangka pelaporan.

Untuk di Indonesia sendiri, penelitian dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan juga telah dilakukan. Simbolon dan Budiharta (2015) meneliti mengenai perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS dalam PSAK instrumen keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014. Berdasarkan kriteria purposive sampling diperoleh 27 sampel dengan tahun penelitian 2009-2014. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kualitas laba sesudah adopsi IAS/IFRS lebih baik dibandingkan sebelum adopsi IAS/IFRS.

Selanjutnya untuk penelitian dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba yang spesifik pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia belum dilakukan, padahal Bank Pembangunan Daerah juga merupakan Bank Umum yang wajib menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan

pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta.

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, dan Ismail 2010). Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. Sampai saat ini terdapat 26 BPD yang ada di Indonesia, rata-rata setiap provinsi mempunyai satu BPD tetapi ada juga BPD yang harus melayani dua provinsi.

Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia tergabung dalam suatu wadah Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) yaitu organisasi profesi bersifat otonom, yang berperan sebagai wadah dalam pemersatu dan mempererat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Bank Pembangunan Daerah di seluruh

Indonesia, khususnya dalam membawakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan BPD pada forum Federasi Perbankan Indonesia dengan segala aktifitasnya.



Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha₁: Terdapat pengaruh penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) terhadap manajemen laba Pada Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia.

2.3 Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yang dalam hal ini dijadikan sebagai variabel kontrol yaitu variable yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik. Agar variabel pengganggu tidak bias mempengaruhi hasil dari pengujian tersebut (Hartono 2007), didalam penelitian ini digunakan variabel kontrol yaitu *Leverage* dan Ukuran Perusahaan (*Size*).

Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi diduga melakukan perataan laba karena perusahaan terancam default sehingga manajemen membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan. Tingkat *leverage* yang tinggi mengidentifikasi resiko perusahaan yang tinggi pula sehingga kreditor sering memperhatikan besarnya resiko ini. Namun dengan tingkat laba yang tinggi maka resiko perusahaan akan kecil (Subramanyam, 2010), hal inilah yang memicu manajemen untuk mengurangi resiko perusahaan dengan berupaya menstabilkan tingkat laba perusahaan dengan berbagai cara, antara lain melalui income smoothing.

Perusahaan yang ukurannya lebih besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba (Herawaty dan Suwito, 2005). Berdasarkan *political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif dikemukakan bahwa perusahaan

besar cenderung untuk melakukan pengelolaan atas laba di antaranya melakukan *income decreasing* saat memperoleh laba tinggi untuk menghindari munculnya peraturan baru dari pemerintah, contohnya menaikkan pajak penghasilan perusahaan. Tindakan perataan laba dapat dilakukan oleh manajemen apabila utilitas manajemen dinilai oleh level dan tingkat pertumbuhan besarnya ukuran perusahaan (Belkaoui 2006). Dalam hal ini kinerja manajemen dinilai berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat berdasarkan total modal yang digunakan, total aset perusahaan atau berdasarkan total penjualan yang diperoleh.

2.4 Penelitian Terdahulu

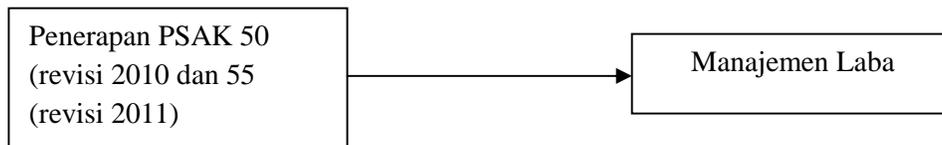
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nnadi (2016).	<i>The Impact of International Financial Reporting Standards Adoption and Banking Reforms on Earnings Management: Evidence from Nigerian Banks</i>	Manajemen Laba	Adanya penurunan manajemen laba pada perbankan di Nigerian setelah penerapan IFRS.
2	Onelo <i>et al.</i> (2014)	<i>The effects of changes in accounting standards on loan loss provisions (LLP) as earnings</i>	Manajemen Laba	Adopsi IFRS dapat menurunkan nilai manajemen laba

		<i>management device: evidence from malaysia and nigeria banks (part I)</i>		
3	Simbolon dan Budiharta (2015)	Analisis perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi ias/ifrs dalam psak instrumen keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014	Manajemen Laba	Terdapat perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kualitas laba sesudah adopsi IAS/IFRS lebih baik dibandingkan sebelum adopsi IAS/IFRS.
4	Santy <i>et al.</i> (2016)	<i>The impact of IFRS adoption on earnings management in banking companies in Indonesia Stock Exchange</i>	Manajemen Laba	Adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap penurunan manajemen laba.
5	Pratama dan Ratnaningsih (2014)	Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi <i>International Accounting Standards (IAS) 39</i> Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Manajemen Laba	Tidak terdapat perbedaan kualitas laba yang ditukur dengan manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

2.5 Model Penelitian

**Pengaruh Penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011)
terhadap Manajemen Laba Pada Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia**



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Dalam melakukan pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan *audit (audit report)*, Website.BI, ASBANDA dan Web masing-masing BPD serta informasi-informasi tambahan lainnya yang terdiri dari informasi kualitatif dan kuantitatif, serta data yang tersedia dibuku-buku, artikel, majalah, artikel surat kabar serta informasi dari publikasi elektronik lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BPD yang ada di Indonesia dengan periode pengamatan 2009-2015. Dalam melakukan pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan *audit (audit report)*, Website BI, ASBANDA dan Web masing-masing BPD.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 26 BPD yang ada di Indonesia pada periode 2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 15 BPD dengan tahun penelitian selama 6 tahun maka observasi pada penelitian ini sebanyak 90 observasi.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, karangan ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian untuk menghimpun pengetahuan teoritis serta teknik-teknik perhitungan yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data diawali dengan mencari perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulan (Cooper dan Schinder, 2006). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh perbankan yang ada di Indonesia.

Sampel adalah elemen sebuah populasi yang akan diambil kesimpulannya dan mencerminkan kondisi populasinya (Cooper dan Schinder, 2006). Sampel pada penelitian ini adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria tertentu yaitu :

1. BPD yang telah berdiri sebelum tahun 2009
2. BPD yang telah mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap secara berturut-turut tahun 2008-2015
3. BPD yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Independen

3.4.1.1 Penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011), dimana pengukuran variabel ini mengikuti penelitian sebelumnya yaitu Santy *et al.* (2016). Variabel ini diukur dengan variabel dummy yaitu nilai 0 untuk periode sebelum penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) serta nilai 1 untuk periode setelah penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011).

3.4.2 Variabel Dependen

3.4.2.1 Manajemen Laba

Dalam penelitian ini, perhitungan manajemen laba dihitung menggunakan model Healy (1985) dan Jones (1991) yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan seperti penelitian yang dilakukan Zahara dan Siregar (2009).

$$TA_{it} = (PMAD_{it} + BDD_{it} + UMP_{it} - BYD_{it} - UP_{it} - BAP_{it} - Dep_{it}) / (A_{it-1})$$

Keterangan :

TA_{it} = total akrual bank pembangunan daerah I pada tahun t

$PMAD_{it}$ = selisih pendapatan masih akan diterima bank pembangunan daerah I pada tahun t dengan t-1

BDD_{it} = selisih beban dibayar dimuka bank pembangunan daerah I pada tahun t dengan t-1

UMP_{it} = selisih uang muka pajak bank pembangunan daerah I pada tahun t dengan t-1

BYD_{it} = selisih beban yang harus dibayar bank pembangunan daerah I pada tahun t dengan t-1

UP_{it} = selisih utang pajak bank pembangunan daerah I pada tahun t dengan t-1

BAP_{it} = beban penyisihan aktiva produktif bank pembangunan daerah I pada tahun t

Dep_{it} = beban depresiasi bank pembangunan daerah I pada tahun t

A_{it-1} = total aktiva bank pembangunan daerah I pada tahun t-1

Kemudian, dilakukan estimasi dengan menggunakan model :

$$TA_{it} / A_{it-1} = a_1(1/A_{it-1}) + b_1(PO_{it}/A_{it-1}) + b_2(PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

TA_{it} = total akrual bank pembangunan daerah I pada tahun t

A_{it-1} = total aktiva bank pembangunan daerah I pada tahun t-1

PO_{it} = selisih pendapatan operasi bank pembangunan daerah I pada tahun t dengan t-1

PPE_{it} = *property, plant, and equipment* (aktiva tetap) bank pembangunan daerah pada tahun t.

Perkiraan *error* (ϵ_{it}) dalam persamaan di atas menunjukkan akrual diskresioner (*discretionary accruals*).

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) tidak lagi menggunakan asumsi bahwa nondiscretionary accruals adalah konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kaplan (1985) yang merupakan dasar pengembangan model yang menyatakan bahwa akrual ekuivalen dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan manajerial atau hasil yang diperoleh dari proses perubahan kondisi perekonomian perusahaan terhadap nondiscretionary accruals. Selain itu, model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pertimbangan.

1. Akrual periode berjalan (*current accruals*) yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan penjualan, sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya.

2. Gross property, plant and equipment merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akrual, khususnya untuk biaya depresiasi nondiscretionary.

Atas dasar dua asumsi diatas, untuk menghitung total akrual, model ini menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan gross property, plant and equipment (Sugyanto, 2008).

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji regresi linier berganda

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{MANLABA}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PSAK} + \beta_2 \text{LEV}_{it} + \beta_3 \text{LnSIZE}_{it} + e$$

Keterangan :

MANLABA : Manajemen laba dihitung menggunakan model Healy (1985) dan Jones (1991) yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan.

PSAK : Dummy 1 untuk setelah penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) dan 0 sebelum penerapan

LEV : Variabel kontrol rasio Hutang (*Leverage*)

LnSize : Variabel control Logaritma Natural total Asset

3.6 Metode Analisis.

3.6.1 Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square (PLS)*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Gujarati dan Porter, 2015).

b. *Fixed Effect Model (FE)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan (Gujarati dan Porter, 2015). Namun demikian sloponya sama antar perusahaan, model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

c. *Random Effect Model (RE)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan (Gujarati dan Porter, 2015). Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas (Gujarati dan Porter, 2015). Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

3.6.2 Pemilihan Metode Estimasi dan Pengujian Hipotesis

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Uji Chow

Untuk mengetahui model yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel *dummy* sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F (Gujarati dan Porter, 2015).

Uji ini digunakan untuk mengetahui teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau disebut dengan metode *Common Effect*. Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*,

dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect* (Gujarati dan Porter, 2015).

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*df*) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n-k$ untuk denominator, m merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel *dummy*. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu, n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect* (Gujarati dan Porter, 2015).

b. Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Namun, metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect* (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-*

Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* (Gujarati dan Porter, 2015).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect* (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai *Lagrange Multiplier* hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect* (Gujarati dan Porter, 2015).

d. Uji Statistik F (Keandalan Model)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak (Gujarati dan Porter, 2015). Definisi

layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Keputusan yang dapat diambil dari uji ini adalah dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Apabila nilai *prob. F* hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak.
- (2) Apabila nilai *prob. F* hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak (Gujarati dan Porter, 2015).

e. Uji Statistik T

Uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi). Uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas. Keputusan yang dapat diambil dari uji t ini adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2015).

- (1) Apabila nilai *prob. t* hitung (ditunjukkan pada *Prob.*) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.
- (2) Apabila nilai *prob. t* hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan PSAK 50 dan 55 terhadap manajemen laba pada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis yang diajukan tidak terdukung, yaitu bahwa penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba
2. Pengujian tambahan yang dilakukan dengan uji *Wilcoxon signed rank test* menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50 dan 55
3. Variabel control leverage perusahaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu antara lain dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel berupa Bank Pembangunan Daerah. Hal ini

dilakukan karena untuk mengetahui dampak penerapan IFRS yang lebih spesifik terhadap salah satu jenis sektor perbankan dan dikarenakan masih sangat minimnya penelitian yang meneliti mengenai dampak IFRS terhadap Bank pembangunan daerah. Akan tetapi dikarenakan hal itulah maka hasil penelitian ini hanya mampu memberikan gambaran penerapan IFRS dalam lingkup yang kurang luas.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar memperluas sampel dengan cara membagi sampel dalam beberapa sektor industri perbankan dan kemudian membandingkannya. Seperti membandingkan dampak penerapan IFRS terhadap bank umum dan bank perkreditan rakyat dan kemudian menguji dampaknya secara keseluruhan, sehingga hasil penelitian tersebut dapat lebih digeneralisasikan mengenai dampak penerapan IFRS terhadap sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelghany, K.E, 2005. Measuring The Quality of Earning. *Managerial Auditing Journal* Vol. 20 No. 9
- Anggraita, Viska, (2012), Dampak Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba diperbankan: Peranan Mekanisme Corporate Governance Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*, XV Banjarmasin.
- Belkaouli, Ahmed Riahi. 2006. Accounting Theory (Buku 1). Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Bohusova. H. dan Nerudova, D. 2009. US GAAP and IFRS Convergence in the Area of Revenue Recognition. *Economics and Management Journal*.
- Chen, Huifa; Tang, Qingliang; Jiang, Yihong dan Lin, Zhijun, (2009), "International Financial Reporting Standards and Accounting Quality : Evidence from the European Union.
- Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Healy, P.M. dan Wahlen, JM. 1999. A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, Vol. 13 No. 4, pp. 365-383.
- Herawaty, Arleen dan Edy Suwito. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Peataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal. SNA VIII Solo*.
- Jensen, M.C dan Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior: Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*.
- Jiraporn, Pornsit, et al. 2008. Dividend Policy and Corporate Governance Quality. *Journal of Finance*.
- Kaiser, J.G. 2012. IFRS and US GAAP: Similarities and Differences.
- Mabrurah, Laila;Islahuddin dan Arfan, Muhammad. 2017. Pengaruh ukuran perusahaan, asimetri informasi, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN 2302-0164

- Naftalia, Veliandina Chivan dan Marsono. 2013. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Diponegoro Jurnal Of Accounting. Volume 2 No.3.*
- Nnadi, Matthias. 2016. The Impact of International Financial Reporting Standards Adoption and Banking Reforms on Earnings Management: Evidence from Nigerian Banks. *African Journal of Accounti, Auditing and Finance.*
- Onelo, Ugbede; Lizam, Mohd; Kaseri, Ahmad; Dan Innocent, Otache. 2014. The Effects Of Changes In Accounting Standards On Loan Loss Provisions (Llp) As Earnings Management Device: Evidence From Malaysia And Nigeria Banks (Part I). *European Journal of Business and Social Science: Vol. 3, No. 8.*
- Pratama, Yongka Arief dan Ratnaningsih, Dewi. 2014. Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi International Accounting Standards (IAS) 39 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *e-Journal Universitas Atma jaya.*
- Santy, Prima; Tawakkal; dan Pontoh, Grace T. 2016. The Impact Of Ifrs Adoption On Earnings Management In Banking Companies In Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Uditng, Vol: 12.*
- Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory 6th edition. Toronto: *Pearson Education Canada.*
- Simbolon, Ella Bertania dan Budiharta, Pratiwi. 2015. Analisis Perbedaan Kualitas Laba Sebelum Dan Sesudah Adopsi Ias/Ifrs Dalam Psak Instrumen Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 2014. *E-journal Undip.*
- Sulistyanto, Sri. 2008. Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris. *Jakarta: PT. Grasindo.*
- Wardhani, Ratna. 2009. Effect of Protection For Investors, Convergence of Accounting Standards, Implementation of Corporate Governance, and Audit Quality on the Quality of Earnings: Analysis of Cross-Country In Asia. *Dissertation Doctoral Program in Accounting, University of Indonesia*
- Watts, R, L., dan Zimmerman, J, L. (1986). Positive Accounting Theory. *New York, Prentice Hall.*

Yip, Erica, Cris Van Steden and Steven Cahan. 2011. Corporate Social Responsibility Reporting and Earnings Management: The Role of Political Costs. *Australian Accounting Business and Journal*. Vol 5.

Zahara dan Siregar, Sylvia Veronioca. 2009. Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol: 12.